

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan dalam pelaksanaannya bernilai ibadah.¹ Adapun tujuannya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*,² Anwar Harjono mengatakan “perkawinan merupakan bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqih”. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin.³

Menurut istilah ilmu fiqih, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*”. Jima’ sesuai dengan makna linguistiknya berasal dari kata “*al-wath*” yaitu bersetubuh atau bersenggama, maka dalam hal ini mengandung pembolehan suami istri untuk berhubungan seks atau bersetubuh yang dengan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang perkawinan, bahwasanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2

² Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 300.

⁴ *Ibid.*

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam syari'at Islam telah diatur terkait prosesi akad suatu perkawinan yang mana telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Namun sering terjadi suatu konflik atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga dan permasalahan tersebut mengakibatkan kurang harmonisnya suatu rumah tangga bermula dari konflik yang kecil hingga permasalahan menjadi besar dan hal tersebut berimbas kepada sebuah perceraian. Oleh karenanya perceraian tidak akan terjadi apabila suatu pasangan dalam menyelesaikan permasalahan dengan sifat kedewasaan dan kesadaran dari masing-masing pasangan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VIII Pasal 38 dikatakan bahwa “suatu perkawinan akan putus diakibatkan karena: a) Kematian, b) Perceraian dan c) Atas keputusan Pengadilan”.⁶

Istilah bangun nikah dalam masyarakat dapat dikatakan dalam bahasa Arab disebut dengan *Tajdid Al-nikah*, yaitu berawal dari *Tajdid* yang menurut bahasa adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari جَدَّدَ - يُجَدِّدُ - تَجْدِيدًا (jaddada-yujaddidu-tajdidan).⁷ Hal tersebut sering dipakai masyarakat dalam hal memperbaharui nikah atau bisa juga dikatakan dalam bahasa jawa yaitu “*nganyari nikah*” yang mana telah dilakukan oleh sebagian masyarakat guna untuk memperbaiki hubungan atau keabsahan pernikahannya. Dari pembaharuan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Husain Al-Habsyi, *kamus Al-kautsar Lengkap*, (Surabaya YAPI, 1997), Vol 43.

akad tersebut diharapkan agar rumah tangga keluarga menjadi lebih baik dalam hal kerukunan atau perekonomian keluarga tersebut.

Masyarakat memahami solusi permasalahan untuk menghilangkan adanya faktor pertengkaran atau kurang harmonis suatu rumah tangga adalah dengan melakukan praktik *bangun nikah*. Praktik *Tajdidun nikah* memang dari sebagian orang sangat awam atau bahkan tidak mengenal tentang hal tersebut, dalam prakteknya disetiap keluarga atau pasangan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dalam Skripsi Ahmad Syaifuddin dengan judul “Problematika Hukum bangun nikah “Studi kasus di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, menerangkan bahwa: “Alasan dari pihak pertama dan kedua melakukan praktik *bangun nikah* dikarenakan istri dari masing-masing pasangan kerja diluar Negeri sebagai TKI, untuk membentuk keluarga agar kembali bahagia dan penuh kasih sayang maka mereka melangsungkan praktik tersebut”.⁸

Dalam skripsi Wahdan Arriza Lutfi dengan judul “Pandangan Kiyai terhadap tradisi bangun nikah guna menekan perceraian dalam kehidupan mahligai keluarga” Studi kasus di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, diterangkan bahwa: “Alasan dari pihak pertama melakukan praktik *bangun nikah* dikarenakan perintah dari orang pintar (mbah dukun) setempat dengan alasan kelurganya sering bertengkar. Sedangkan pihak kedua sama halnya dengan pihak pertama melainkan memiliki alasan yang

⁸ Ahmad Syaifuddin, “*Problematika Hukum bangun nikah: Studi Di Kec. Sambit, Kab. Ponorogo*” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016), 39.

berbeda karena tidak sesuai dengan ketentuan Agama, wali dari perempuan merupakan paman dari ibu yang seharusnya ialah kakak laki-lakinya.⁹

Sedangkan dalam skripsi Khoirul Umam dengan judul “Pembaharuan akad nikah Masyarakat Muslim berdasarkan petungan Jawa” Studi kasus di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, diterangkan bahwa: “Alasan dari pihak pertama melaksanakan praktik *bangun nikah* dikarenakan pernikahan pertama tidak tepat pada *petungan* Jawa. Kemudian pihak kedua dikarenakan perekonomian kurang lancar, dan dari pihak ketiga tidak dikaruniai anak.¹⁰

Fenomena inilah yang penulis dapati sehingga menjadi ketertarikan penulis sendiri dalam menyelesaikan tugas akhir, yang mana bermula di bangku perkuliahan tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang ketika seorang dosen membuka suatu pertanyaan kepada mahasiswanya kemudian seorang mahasiswa menanyakan “apa hukum dari *bangun nikah*”. Berangkat dari situlah penulis memiliki inisiatif untuk mencari tau adakah seorang pasangan yang melakukan praktik *bangun nikah* itu, dan setelah penulis mengkroscek ternyata fenomena tersebut memang ada dan pada akhirnya penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penelitian. Tepatnya di Dusun Dermo Desa Mulyoagung Kabupaten Malang.

Bermula pasangan suami istri yang telah menikah sah secara *syara'* dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan rentang waktu yang cukup lama

⁹ Wahdan Arizza Lutfi, “*Pandangan Kiyai terhadap Tradisi Bangun Nikah Guna Menekan perceraian dalam kehidupan mahlilai keluarga*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 84

¹⁰ Khoirul Umam, “*Pembaharuan akad nikah Masyarakat Muslim berdasarkan petungan Jawa*” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015), 56

pasangan tersebut mengalami pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah untuk sementara waktu, yang pada akhirnya mendapat solusi dari orang tuanya untuk melakukan *bangun nikah* agar keluarganya kembali bahagian dan penuh kasih sayang.

Jika memang alasan untuk melakukan praktik *bangun nikah* karena pernikahan annya tidak sesuai dengan ketentuan agama atau Undang-Undang karena wali dari pernikahan annya adalah Paman dari ibu sedangkan masih ada kakak laki-laki, kenapa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukannya praktik *bangun nikah* melainkan tidak dengan melakukan isbat nikah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 poin (c)¹¹ sudah jelas bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah diantaranya terdapat dalam poin (c) “adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”, maka dapat kita tarik kesimpulan apabila khawatir ada syarat atau rukun perkawinan yang belum terpenuhi maka dapat melakukan pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Dari beberapa penjelasan di atas tentang *Tajdidun nikah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tajdidun nikah* merupakan pembaharuan suatu akad nikah, kalau kita Tarik kepada arti lebih luas yaitu sudah pernah melakukan akad nikah yang sah secara *shara'* yang kemudian dengan maksud *ihhtiyat* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati oleh karena itu dilakukan akad sekali lagi dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Yang nantinya akan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 poin (c) Dasar-Dasar Perkawinan.

menjadikan hubungan perkawinan suami istri menjadi keluarga yang hidup penuh dengan kasih sayang, saling tolong menolong dan bahagia.

Ada beberapa jumhur ulama' yang mengatakan bahwa *tajdidun nikah* boleh, karena mengulangi akad nikah yang pertama didalam akad yang kedua dan tidak merusak akad nikah yang pertama tersebut. Salah satunya adalah Ibnu Munir yang kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Ashqalani. Kemudian disamping itu ada juga ulama' yang mengatakan bahwa *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah yang sebelumnya yaitu Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, yaitu ulama' yang terkemuka pada tahun 779 H.¹²

Maka dari itu dalam hal ini sangat cocok untuk diteliti dan dikaji, yang mana hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penyusun untuk mencermati lebih dalam dan mengetahui bagaimana landasan normatif yang mendasari terjadinya bangun nikah yaitu dengan memilih judul **“PRAKTIK TAJDIDUN NIKAH BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”** (Studi kasus di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kab Malang).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang peneliti angkat dalam bahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Tajdidun nikah* di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kab Malang?

¹² Ahmad Syaifuddin, “*Problematika Hukum bangun nikah: Studi Di Kec. Sambit, Kab. Ponorogo*” Skripsi, STAIN Ponorogo, 4.

2. Bagaimana praktik *Tajdidun nikah* berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan dan Kontribusi

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik *Tajdidun nikah* di Dusun Dermo, Desa. Mulyoagung Kab Malang.
- b. Untuk mengetahui Hukum *Tajdidun nikah* berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Kontribusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dengan hasil yang akan didapatkan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru di Universitas Muhammadiyah Malang khususnya program studi Hukum keluarga Islam terhadap tradisi *bangun nikah* atau *tajdidun nikah* yang ada di masyarakat.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis

Sebagai tambahan wawasan tentang suatu hukum dan pendapat yang ada dalam masyarakat.

- 2) Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu masukan ilmu pengetahuan untuk masyarakat.

- 3) Bagi lembaga yang berwenang

Semoga dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam memutuskan suatu hukum atau membuat suatu kebijakan dalam masalah tradisi *bangun nikah*.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Syafuddin (2016), dengan judul “*Problematika Hukum Bangun Nikah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*”, pada skripsi tersebut, pokok bahasan masalah yang dikemukakan penulis yaitu tentang motif tradisi bangun nikah dan problematika bangun nikah yang ada di kecamatan sambit, kabupaten ponorogo.

Dalam skripsi Ahmad Syaifuddin, letak perbedaannya ialah kenapa hukum tajdidun nikah yang ada di masyarakat seakan-akan timbul permasalahan terkait hukumnya serta mencari tahu lebih dalam apa istilah tajdidun nikah dan dari mana asal muasalnya terkait istilah tersebut. Sedangkan skripsi yang akan penulis tuangkan di sini lebih kepada bagaimana praktik *tajdidun nikah* tersebut dan juga bagaimana hukumnya jika di tinjau berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Wahdan Arrizal Luthfi (2016), dengan judul “*Pandangan Kiyai terhadap Tradisi Bangun Nikah guna menekan perceraian dalam kehidupan mahligai keluarga*”, pada skripsi tersebut, pokok bahasan masalah yang dikemukakan penulis yaitu tentang bagaimana akad *bangun nikah* menurut prespektif kiyai setempat dan mengapa tradisi akad *bangun nikah* mempengaruhi kehidupan mahligai rumah tangga yang ada di Desa Krajangan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.

Skripsi Wahdan Arriza Lutfi tersebut lebih terfokus kepada apa pengaruh melakukan *Tajdidun nikah* yang seakan-akan hal tersebut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga menjadi lebih baik dan bahagia. Sedangkan dalam skripsi penulis lebih kepada bagaimana praktik *tajdidun nikah* tersebut dan apa hukumnya jika ditinjau berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Khoirul Umam (2015), dengan judul “*Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa*”, pada skripsi tersebut pokok bahasan masalah yang dikemukakan penulis adalah tentang bagaimana konsep pernikahan berdasarkan *Petungan Jawa* dan faktor apakah yang mendorong masyarakat Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati melakukan pembaharuan nikah yang mana didasari dengan *Petungan Jawa*.

Dalam skripsi Khoirul Umam, lebih terfokus kepada konsep pernikahan dalam petungan jawa dan juga faktor-faktor apa yang mengakibatkan suatu pasangan melakukan istilah *tajdidun nikah* serta apa pandangan tokoh masyarakat setempat dan masyarakat terkait istilah praktik *tajdidun nikah* . Jika kita ambil perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Khoirul Umam maka tentu disitu terdapat perbedaan karena penulis lebih terfokus kepada seperti apa praktik *tajdidun nikah* tersebut dan bagaimana hukumnya jika di tinjau berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Kajian penelitian terdahulu diatas sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada disuatu daerah yang berbeda-beda, khususnya pada persoalan istilah praktik *Tajdidun nikah* dan juga untuk

tambahan wawasan keilmuan bagi yang meneliti dan perguruan tinggi mereka masing-masing. Akan tetapi disini terdapat perbedaan yang akan dituangkan dalam tulisan peneliti yaitu lebih terfokus kepada bagaimana istilah praktek *Tajdidun nikah* yang ada di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung Kabupaten Malang, dan juga bagaimana jika praktik *Tajdidun nikah* tersebut dihadapkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif, yang mana peneliti akan terjun langsung untuk menggali data yang valid kepada pelaku atau orang yang telah melakukan tradisi bangun nikah yang ada di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang.

2. Sumber data

Sumber data adalah dari mana data diperoleh, dalam penelitian ini diperoleh dari data Primer dan data Skunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki, data primer yang peneliti gunakan adalah pihak pelaku atau orang yang telah melakukan praktek *tajdidun nikah* dan orang yang menikahkan tepatnya di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah masyarakat, buku-buku pendukung lain, hasil penelitian yang telah ada, artikel diinternet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang *tajdidun nikah* yang ada di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kabupaten Malang.

Yang dalam hal ini peneliti berfokus kepada enam *informants*: pertama, Bapak Yusuf Agus Tribuana dan Ibu Deni Rahmawati. Kedua, Bapak Hadi Purwanto dan Ibu Siti Khoiriyah. Ketiga Bapak Dadang dan Ibu Yu'it. Keempat Bapak Sama'un dan Ibu Jum'atin. Yang dalam hal ini akan mengulas mengenai kapan melakukan praktik *tajdidun nikah* dan atas dasar apa. Kelima Bapak Asmuji selaku *modin* atau orang yang menikah kan mengulas tentang *tajdidun nikah* dan praktiknya. yang keenam ialah pandangan masyarakat atau ketua RT setempat tentang praktik tersebut.

¹³ Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 186.

b. Observasi

Menurut Sutrisno “observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung ketengah lapangan penelitian dengan pencatatan yang sistematis terhadap fakta yang dihadapi”.¹⁴ Disini peneliti akan terjun langsung tepatnya di wilayah Dusun Dermo untuk mengetahui bagaimana praktik *tajdidun nikah* tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berupa catatan dan berkas *soft file* tentang profil Desa Mulyoagung yang mencakup tentang geografis Desa, yang mana hal ini diperlukan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan ialah metode deskriptif kualitatif, yang mana penulis akan mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.¹⁵

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode research I*. (UGM, Yogyakarta. 1969).

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang, Pengertian Perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, putusnya perkawinan dan *tajdidun nikah* dalam pandangan fiqih.

BAB III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang berupa:

Gambaran umum lokasi penelitian, keadaan sosial Masyarakat, hasil wawancara tentang praktek *tajdidun nikah*, bagaimana pandangan tokoh masyarakat atau *kiyai* yang telah menikahkan dalam praktik *tajdidun nikah*, serta menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dikemukakan dan analisa.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

